

Transparansi Anggaran Publik sebagai Pilar Good Governance pada Pemerintahan Daerah di Indonesia

Siti Khofifah Hanif¹, Lidya Vanya F. Sihombing², Yendita Pakpahan³, Muhammad Yudi Fajri⁴, Alexa Angelica Nababan⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: khofifahhanifsiti20@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4605>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 26 Dec 2025

Kata Kunci:

Transparansi Anggaran
Akuntabilitas Publik
Good Governance
Budget Transparency
Public Accountability
Good Governance

Keywords:

Budget Transparency
Public Accountability
Good Governance
Budget Transparency
Public Accountability
Good Governance



ABSTRACT

Studi ini mengkaji peran transparansi anggaran publik sebagai pilar penting tata kelola yang baik pada pemerintah daerah di Indonesia. Dengan metode tinjauan literatur kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai publikasi nasional dan internasional untuk memahami hubungan antara transparansi, akuntabilitas, efisiensi belanja publik, dan pengawasan masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akurasi serta keandalan pelaporan keuangan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Akses terbuka terhadap dokumen anggaran yang didukung penerapan e-government dan e-budgeting juga terbukti mendorong partisipasi publik, menekan potensi korupsi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal. Temuan empiris mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat transparansi lebih tinggi cenderung memiliki efisiensi belanja lebih baik, kepercayaan publik yang meningkat, dan kesesuaian lebih kuat antara perencanaan dan realisasi anggaran. Studi ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya prinsip normatif, tetapi mekanisme operasional yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola daerah.

This study examines the role of public budget transparency as a key pillar of good governance in local governments in Indonesia. Using a qualitative literature review approach, it analyzes various national and international publications to explore the relationship between transparency, accountability, public spending efficiency, and community oversight. The literature shows that transparency reduces information asymmetry, increases the accuracy and reliability of financial reporting, and strengthens local government accountability. Open access to budget documents supported by the implementation of e-government and e-budgeting systems has also been shown to enhance public participation, reduce corruption risks, and improve fiscal management effectiveness. Empirical evidence indicates that regions with higher transparency levels tend to demonstrate better spending efficiency, increased public trust, and stronger alignment between planning and budget realization. This study affirms that transparency is not only a normative principle but also an operational mechanism that directly influences the quality of governance at the regional level.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Siti Khofifah Hanif et al (2025). Transparansi Anggaran Publik sebagai Pilar Good Governance pada Pemerintahan Daerah di Indonesia, 4(3) 14895-14899. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4605>

PENDAHULUAN

Konsep *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) telah menjadi agenda reformasi birokrasi di berbagai negara, karena dianggap sebagai fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum merupakan prinsip utama yang diyakini dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks nasional, Indonesia memperkuat arah reformasi tersebut melalui kebijakan otonomi daerah dan penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan

(Widodo, 2001) Pada tingkat pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis karena mencerminkan prioritas pembangunan serta alokasi sumber daya keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pengelolaan APBD masih menghadapi persoalan rendahnya transparansi, kurangnya akses publik terhadap informasi anggaran, serta tingginya potensi penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik belum berjalan secara optimal dan sistem pengelolaan anggaran masih rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan (Hatees, 2010).

Dalam kerangka *Good Governance*, transparansi anggaran publik diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi fiskal yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Hasanuddin, Nirwana & Haliah, 2023). Transparansi tidak hanya sebatas membuka dokumen anggaran, tetapi juga mencakup kualitas informasi, kejelasan, serta ketersediaan dokumen mulai dari pra-anggaran, pelaksanaan, realisasi anggaran hingga laporan audit (Bronić et al., 2022). Dengan demikian, transparansi menjadi mekanisme penting dalam menegakkan kontrol publik dan mencegah terjadinya penyimpangan dana publik. Penerapan transparansi anggaran juga berperan langsung dalam meningkatkan akuntabilitas publik, karena masyarakat dapat memantau bagaimana pemerintah merencanakan, menggunakan, serta mempertanggungjawabkan anggaran daerah. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan anggaran, sehingga potensi korupsi maupun ketidak efisienan belanja dapat diminimalisasi (Listivaniputri, 2021). Literatur menunjukkan bahwa transparansi anggaran memiliki korelasi positif dengan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah, mendorong perencanaan yang lebih terukur, serta mengurangi pemborosan anggaran (Gedeona, 2005).

Dalam perkembangan tata kelola modern, penerapan sistem digital melalui *e-government* dan *e-budgeting* menjadi sarana penting dalam meningkatkan transparansi fiskal. Jung (2022) menemukan bahwa digitalisasi proses anggaran mengurangi peluang intervensi non-prosedural karena seluruh dokumen terekam dalam sistem dengan jejak digital (*digital traceability*). Temuan ini diperkuat oleh Sari dan Muslim (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan *e-budgeting* meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah karena proses pelaporan dan audit menjadi lebih kredibel, sistematis, dan real time. Penelitian empiris menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat keterbukaan anggaran yang tinggi cenderung memiliki belanja publik yang lebih efisien, lebih sedikit anggaran tidak terserap, serta memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan tingkat transparansi rendah (Badewin et al., 2025; Mustika et al., 2025). Selain itu, Bronić et al. (2022) menegaskan bahwa transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman konseptual mengenai posisi transparansi anggaran sebagai fondasi utama *Good Governance* serta bagaimana kaitannya dengan akuntabilitas, efisiensi belanja publik, dan mekanisme pengawasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis temuan penelitian sebelumnya dan membangun kerangka konseptual yang komprehensif terkait urgensi transparansi anggaran dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat praktik transparansi fiskal sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai sumber data akademik dan dokumen resmi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep transparansi anggaran publik dalam konteks penyelenggaraan *Good Governance*. Penelitian studi literatur dilakukan tanpa intervensi atau keterlibatan langsung peneliti terhadap subjek fenomena, melainkan melalui analisis sumber data yang telah diterbitkan dan dapat diverifikasi (Ayuntamara & Anam, 2021). Penelitian deskriptif dipilih karena mampu menghasilkan pemaparan sistematis mengenai fenomena yang diteliti serta memberikan dasar konseptual untuk analisis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari–Februari 2025. Proses penelitian dilakukan secara daring dengan memanfaatkan repositori akademik, perpustakaan digital, dan sumber resmi pemerintah.

Target atau Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber literatur yang berhubungan langsung dengan fokus kajian, seperti jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, regulasi, serta dokumen berbasis data publik yang terkait dengan transparansi anggaran, *Good Governance*, dan e-budgeting. Pemilihan sumber menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih referensi berdasarkan relevansi, validitas, dan kemutakhiran (10 tahun terakhir kecuali referensi seminal).

Prosedur Penelitian

Proses penelitian dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi sumber literatur melalui database ilmiah seperti Google Scholar, portal pemerintah, serta perpustakaan digital.
2. Seleksi sumber berdasarkan relevansi, tahun publikasi, kredibilitas institusi penerbit, serta keterkaitan dengan fokus penelitian.
3. Klasifikasi dan kategorisasi temuan literatur berdasarkan tema seperti (a) transparansi anggaran, (b) prinsip *Good Governance*, (c) e-budgeting, dan (d) hasil penelitian terdahulu.
4. Analisis data dan sintesis teori untuk merumuskan hubungan konseptual antarvariabel dan membangun narasi ilmiah.
5. Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama, kesenjangan literatur, dan relevansi dengan konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Data dan Instrumen

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah dan dokumen resmi. Instrumen utama penelitian adalah *review matrix* yang digunakan untuk mengorganisir informasi, mengidentifikasi pola hubungan, serta menyusun analisis literatur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Literatur, Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen peraturan pemerintah, laporan kelembagaan, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memberikan dasar teoritis dan empiris untuk mendukung analisis penelitian.
2. Analisis Dokumen, Dokumen pemerintah seperti undang-undang, laporan audit, dan instrumen pelaporan APBD dianalisis untuk memperoleh data faktual dan kontekstual terkait transparansi anggaran dan mekanisme akuntabilitas publik.
3. Observasi Tidak Langsung (*Non-participatory Observation*), Observasi dilakukan melalui monitoring situs resmi pemerintah daerah, portal e-budgeting, serta publikasi digital lainnya, tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan pengelolaan anggaran.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis ini melibatkan proses interpretasi, identifikasi tema utama, triangulasi informasi antar sumber, serta penyimpulan hubungan konseptual untuk menjawab tujuan penelitian. Melalui teknik ini, data yang diperoleh dimaknai secara sistematis dan dihubungkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui proses analisis literatur terhadap berbagai sumber akademik yang relevan terkait transparansi anggaran publik, *Good Governance*, implementasi e-budgeting, serta temuan empiris pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil telaah tersebut, ditemukan bahwa transparansi anggaran memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Selain itu, keterbukaan informasi anggaran berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan. Secara tematik, hasil analisis literatur dapat dikategorikan ke dalam empat fokus utama, yaitu: (1) urgensi transparansi anggaran publik sebagai fondasi *Good Governance*, (2) hubungan transparansi dengan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, (3) peran teknologi melalui e-government dan e-budgeting dalam mendorong keterbukaan informasi, serta (4) temuan empiris implementasi transparansi anggaran di pemerintah daerah.

Tabel 1. *Style* dan Fungsinya

No.	Fokus Analisis	Temuan Inti
1	Transparansi sebagai fondasi Good Governance	Transparansi memperkuat legitimasi pemerintah dan membuka akses publik terhadap informasi anggaran.
2	Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi	Transparansi meningkatkan akuntabilitas dan menurunkan risiko korupsi serta belanja tidak efisien.
3	Peran e-government/e-budgeting	Digitalisasi anggaran meningkatkan aksesibilitas, keakuratan data, dan efektivitas pengawasan.
4	Temuan empiris penelitian daerah	Daerah dengan tingkat transparansi lebih tinggi menunjukkan penyelenggaraan anggaran yang lebih optimal.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh sumber literatur yang dianalisis menegaskan peran strategis transparansi anggaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu pola penting yang ditemukan adalah bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif birokrasi, tetapi juga sebagai mekanisme operasional yang memengaruhi struktur pengawasan, efektivitas anggaran, dan kepercayaan publik. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government, khususnya e-budgeting, berperan sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Digitalisasi dokumen anggaran memungkinkan masyarakat memantau alur perencanaan hingga realisasi anggaran secara lebih efektif, sehingga mempersempit ruang manipulasi dan memperkuat mekanisme audit.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa transparansi anggaran publik memainkan peran sentral dalam mendukung penerapan *Good Governance* di pemerintah daerah. Transparansi memungkinkan publik memperoleh akses terhadap informasi formal mengenai proses penyusunan, realisasi, serta pertanggungjawaban anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menuntut pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara jujur dan terbuka. Temuan tersebut menjawab pertanyaan mengapa pengelolaan anggaran yang bersifat tertutup sering kali memunculkan kasus penyimpangan dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika akses informasi dibatasi, ruang kontrol publik melemah, sehingga peluang penyalahgunaan kewenangan meningkat. Sebaliknya, tingkat transparansi yang tinggi terbukti meningkatkan kualitas audit, efisiensi anggaran, dan efektivitas program pembangunan. Peran teknologi dalam mendukung transparansi menjadi sorotan penting dalam kajian ini. Sistem e-budgeting memungkinkan proses administrasi anggaran dilakukan secara digital, sehingga jejak informasi lebih mudah dilacak dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, implementasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendali penyimpangan. Hasil menunjukkan bahwa transparansi anggaran merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari *Good Governance*. Transparansi memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi anggaran, membuka ruang partisipasi publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih kredibel dan berintegritas.

SIMPULAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi anggaran merupakan pilar utama dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Transparansi mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan dokumen anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kejujuran fiskal, serta meminimalkan peluang korupsi. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa transparansi berkontribusi pada peningkatan efisiensi belanja publik, khususnya ketika didukung oleh implementasi teknologi digital seperti e-budgeting dan portal informasi anggaran daerah. Transparansi tidak hanya berdampak pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga pada dimensi sosial pemerintahan. Keterbukaan informasi yang mudah diakses publik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, dan

membangun kepercayaan publik. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa efektivitas transparansi sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Beberapa daerah masih menghadapi hambatan berupa resistensi internal, rendahnya kapasitas aparatur, dan minimnya literasi anggaran publik. Oleh karena itu, peningkatan komitmen birokrasi, penguatan sistem informasi, serta edukasi publik menjadi syarat penting agar transparansi benar-benar memberikan nilai substansial. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi anggaran bukan hanya instrumen administratif, tetapi mekanisme vital untuk mewujudkan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik dalam kerangka good governance. Pemerintah daerah di Indonesia perlu terus memperkuat implementasi transparansi—baik melalui regulasi, digitalisasi, maupun kolaborasi dengan masyarakat agar kualitas tata kelola dapat meningkat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian serta penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Medan yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Alhasymi Matondang atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan artikel ini. Selain itu, peneliti berterima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan data yang diperlukan, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Peneliti menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang terkait.

REFERENSI

- Daerah, D. I. T., Gedeona, H. T., & Si, M. (n.d.). *SEBUAH ALTERNATIF PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh* : 258–267.
- Ilmu, J., Dan, K., Politik, S., Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (2025). *Transparansi Anggaran Publik Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah*. 02(04), 1245–1250.
- Mutmainnah, S., Nor, W., Rahardian, M., & Helmina, A. (2023). *Determinan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia*. 5. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>
- Nabila, P., Maulina, I., Islam, U., Sultanah, N., Lhokseumawe, N., Governance, G., & Kinerja, A. (2025). *EFEKTIVITAS AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. 5(1), 1–10.